

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Isu pelanggaran hak asasi manusia merupakan isu fundamental yang terjadi di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Salah satu kasus yang paling mencolok dan mendapat sorotan luas adalah situasi etnis Muslim Uighur di Xinjiang, Cina. Sejak Pemerintah Cina mulai menerapkan kebijakan yang mengklaim bertujuan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme, banyak laporan yang menunjukkan adanya praktik kerja paksa sistematis, penahanan massal, dan pelanggaran hak asasi manusia serius terhadap komunitas Uighur.

Kebijakan represif yang diterapkan oleh Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang memiliki akar yang dalam dan kompleks. Setelah pembentukan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, wilayah Xinjiang yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi strategis menjadi prioritas integrasi bagi pemerintah pusat. Salah satu langkah yang diambil untuk memperkuat kontrol adalah dengan mendatangkan etnis Han ke wilayah tersebut, yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh etnis Uighur dan memperkuat kontrol sosial-ekonomi. Namun, migrasi ini menyebabkan ketegangan antara etnis Han dan Uighur, di mana kelompok Uighur merasa terpinggirkan dalam hal pekerjaan dan distribusi sumber daya.

Kebijakan Pemerintah Cina yang melibatkan penahanan massal, pengawasan ketat, dan indoktrinasi politik terhadap etnis Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya telah memicu kecaman luas dari berbagai organisasi hak

asasi manusia, pemerintah asing, dan lembaga internasional. Menurut laporan Human Rights Watch, diperkirakan lebih dari satu juta warga Uighur ditahan di kamp-kamp "pendidikan ulang" yang dirancang untuk mengekang ekstremisme dan separatisme (Human Rights Watch, 2018). Kebijakan ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan identitas budaya dan agama etnis Uighur, yang merupakan salah satu kelompok minoritas di Cina.

Etnis Uighur adalah kelompok Turki yang mayoritas beragama Islam dan memiliki budaya serta bahasa yang berbeda dari mayoritas Han yang mendominasi Cina. Sejarah panjang ketegangan antara Uighur dan pemerintah pusat Cina telah menciptakan situasi yang kompleks dan penuh konflik. Pemerintah Cina menganggap Uighur sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, terutama setelah serangkaian insiden kekerasan yang terjadi di Xinjiang. Sebagai respon, pemerintah meluncurkan kampanye besar-besaran untuk "mendidik" dan "mengintegrasikan" Uighur ke dalam budaya Han, dengan tujuan untuk menghilangkan apa yang mereka sebut sebagai 'ekstremisme'.

Wilayah Xinjiang, yang secara historis dikenal sebagai Turkestan Timur, telah lama menjadi medan konflik karena letaknya yang strategis dan keanekaragaman etnis serta agama. Sejak Dinasti Qing menguasai wilayah ini pada abad ke-18, penduduk mayoritas Muslim Uighur sering kali menentang pemerintahan pusat yang dianggap menindas dan mengancam identitas budaya mereka. Pemberontakan besar pertama terjadi pada pertengahan abad ke-19, dipicu oleh kebijakan Qing yang membatasi kebebasan beragama dan mendatangkan migran Han ke wilayah ini. Salah satu perlawanan signifikan adalah Pemberontakan

Dungan (1862–1877), di mana etnis Muslim Uighur dan Hui bangkit melawan pemerintahan Qing. Pemberontakan ini berhasil mendirikan pemerintahan independen singkat di Kashgar sebelum akhirnya dihancurkan oleh pasukan Qing (Millward, 2007).

Pada abad ke-20, aspirasi kemerdekaan Uighur semakin menguat, terutama di bawah pengaruh gerakan nasionalis di Asia Tengah. Pada tahun 1933, Republik Turkistan Timur atau *East Turkestan Republic* (ETR) pertama didirikan di Kashgar setelah serangkaian pemberontakan melawan Pemerintah Cina yang dipimpin oleh Kuomintang. Namun, republik ini hanya bertahan singkat karena intervensi pasukan nasionalis Cina dan kekuatan regional lainnya. Pemberontakan kembali terjadi pada tahun 1944, yang menghasilkan pendirian ETR kedua di wilayah Xinjiang utara. Pemerintahan ini didukung oleh Uni Soviet, yang memberikan bantuan militer dan politik. Namun, ETR kedua berakhir pada tahun 1949 ketika Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memasuki Xinjiang dan mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam Republik Rakyat Tiongkok (Millward, 2007).

Sejak 1950-an, kebijakan domestik RRT di Xinjiang telah memicu ketidakpuasan di kalangan Uighur. Program migrasi besar-besaran yang membawa etnis Han ke Xinjiang, bersama dengan kebijakan asimilasi budaya, memperburuk ketegangan etnis. Pada tahun 1990, protes besar terjadi di Baren, sebuah kota kecil di Xinjiang, yang dikenal sebagai Insiden Baren. Protes ini dipimpin oleh kelompok nasionalis Uighur yang menuntut otonomi lebih besar dan penghentian represi terhadap budaya serta agama mereka. Respons pemerintah berupa tindakan militer

yang keras memperburuk situasi, memicu gelombang radikalisme di beberapa kelompok Uighur (Clarke, 2011).

Ketegangan meningkat drastis pada dekade 2000-an dengan insiden-insiden besar seperti kerusuhan Urumqi tahun 2009. Kerusuhan ini dipicu oleh bentrokan antara etnis Uighur dan Han di ibu kota Xinjiang, yang mengakibatkan ratusan kematian. Pemerintah Cina menanggapi kerusuhan ini dengan pengawasan ketat, peningkatan pasukan keamanan, dan penindakan keras terhadap kelompok-kelompok yang dituduh terlibat separatisme. Selain itu, serangan sporadis yang dikaitkan dengan militan Uighur, seperti serangan stasiun kereta Kunming pada 2014, semakin memperkuat kebijakan keras Beijing di Xinjiang. Pemerintah menyebut serangan ini sebagai aksi terorisme, meskipun banyak aktivis Uighur mengklaim bahwa tindakan keras pemerintah adalah bentuk represif terhadap kebebasan berpendapat (Roberts, 2020).

Sejak tahun 2016, ketika Chen Quanguo diangkat sebagai Sekretaris Partai Komunis di Xinjiang, kebijakan represif terhadap etnis Uighur semakin meningkat. Program "*Strike Hard Campaign against Violent Extremism*" diluncurkan dengan tujuan untuk mengatasi apa yang Pemerintah Cina sebut sebagai ancaman terorisme (Wardah, 2018). Dalam konteks ini, Pemerintah Cina berargumen bahwa tindakan represif diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional.

Lebih dari satu juta etnis Uighur telah ditahan di kamp-kamp "pendidikan ulang". mereka dipaksa untuk menjalani indoktrinasi politik dan pelatihan kerja. Banyak mantan tahanan melaporkan bahwa mereka mengalami penyiksaan fisik

dan psikologis, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan kebebasan beragama. Selain itu, banyak dari mereka yang dipindahkan ke pabrik-pabrik di seluruh Cina untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa kompensasi yang layak.

Penahanan massal etnis Uighur di kamp-kamp pendidikan ulang bukan hanya tindakan represif tetapi juga mencerminkan pendekatan sistematis Pemerintah Cina dalam mengendalikan populasi yang dianggap berpotensi ekstremis. Menurut laporan PBB pada tahun 2018, terdapat indikasi bahwa kebijakan ini telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan (Cumming-Bruce, 2018). Banyak dari mereka ditahan tanpa proses hukum yang jelas dan tidak pernah didakwa dengan kejahatan apapun. Selain itu, laporan dari World Uighur Congress menunjukkan bahwa para tahanan dipaksa untuk meneriakkan slogan-slogan Partai Komunis dan menjalani indoktrinasi politik (BBC, 2018).

Selain penahanan massal, Pemerintah Cina juga menerapkan sistem pengawasan yang sangat ketat di Xinjiang. Teknologi pengawasan modern digunakan untuk memantau kehidupan sehari-hari warga Uighur. Ini termasuk penggunaan kamera pengawas di tempat umum, pemantauan komunikasi digital, dan pengumpulan data biometrik seperti DNA (Australian Strategic Policy Institute, 2020). Pemerintah juga melakukan kontrol terhadap praktik keagamaan dengan melarang kegiatan ibadah tertentu dan menghancurkan masjid-masjid yang dianggap ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya

bersifat represif tetapi juga bertujuan untuk menghapus identitas budaya etnis Uighur

Praktik kerja paksa terhadap etnis Uighur telah menjadi sorotan utama dalam laporan-laporan internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Cina. Salah satunya adalah laporan yang dirilis oleh Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pada tanggal 21 Agustus 2022 yang menyimpulkan bahwa "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" telah dilakukan oleh Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang. Laporan ini mencakup temuan tentang penahanan arbitrer, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya, serta menyatakan bahwa tindakan ini mungkin memenuhi syarat sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" (Worthington, 2022).

Terdapat pula laporan dari Amnesty International yang juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Cina. Laporan-laporan ini mencakup kebijakan pengawasan yang melanggar privasi, penahanan tanpa proses hukum yang adil, serta penggunaan kekerasan dan penyiksaan oleh aparat keamanan. Amnesty menggambarkan situasi di Xinjiang sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling serius di dunia saat ini (Martins et al., 2023). Selain itu, Human Rights Watch (HRW) juga telah menerbitkan laporan-laporan mendalam mengenai perlakuan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur. Laporan-laporan ini mencakup informasi tentang detensi massal, kerja paksa, dan kebijakan diskriminatif yang diterapkan terhadap Uighur. HRW menekankan bahwa kebijakan Pemerintah Cina tidak hanya melanggar hak-hak individu tetapi juga berpotensi menjadi bentuk genosida (Zulkarnain, 2019).

Tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Cina telah menarik perhatian komunitas internasional dan memicu debat tentang tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia. Sejumlah negara telah mengeluarkan pernyataan mengecam tindakan Pemerintah Cina dan menyerukan penyelidikan independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang (Globalr2p, 2020).

Namun, respon internasional seringkali lemah karena kepentingan ekonomi dan politik negara-negara lain yang berhubungan dengan Cina. Banyak negara memilih untuk tidak mengambil tindakan tegas karena khawatir akan merusak hubungan diplomatik atau perdagangan dengan Cina. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran global tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, faktor-faktor politik dan ekonomi seringkali menghalangi tindakan konkret.

Kebijakan represif Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang mencerminkan tantangan besar dalam upaya menjaga hak asasi manusia di tingkat global. Penahanan massal dan pengawasan ketat adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan populasi yang dianggap berpotensi ekstremis. Isu ini penting untuk dibahas dalam konteks hubungan internasional karena menyentuh aspek fundamental tentang bagaimana negara-negara harus bertindak ketika hak asasi manusia dilanggar. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kepentingan nasional Cina dalam konteks kebijakan represif terhadap etnis Uighur serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan ekonominya secara global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang dideskripsikan di bagian latar belakang, telah diketahui bagaimana perkembangan umum mengenai situasi etnis Uighur di Xinjiang, Cina. Maka dari itu, timbul pertanyaan penelitian, yaitu “Mengapa Pemerintah Cina menerapkan kebijakan represif terhadap Etnis Uighur di Xinjiang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang dikategorikan kedalam dua tujuan terpisah, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut uraian mengenai kedua tujuan tersebut.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dibalik kebijakan represif yang diterapkan oleh Pemerintah Cina terhadap Etnis Uighur di wilayah Xinjiang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan domestik Cina di Xinjiang dapat menjadi hal fundamental untuk mempertahankan kekuatan hegemoninya di kawasan regional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kegunaan akademis dan juga praktis bagi para pembaca sebagai mana yang akan diuraikan dalam sub bab berikutnya.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi hubungan internasional, dimana pembaca akan mendapatkan pemahaman baru melalui teori dan konsep yang ditawarkan sehingga dapat diaplikasikan nantinya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi wawasan dan tambahan preferensi bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai alasan dibalik kebijakan represif Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang, Cina. Ditambah dengan faktor-faktor yang mendukung untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, maka diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam melihat permasalahan ini.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis membutuhkan acuan dari peneliti terdahulu sebagai salah satu landasan berpikir. Penulis menggunakan lima penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan terhadap konteks yang diangkat penulis pada saat ini. Pertama yaitu jurnal yang berjudul “*When Realpolitik*

Triumphs over Uighur Rights in Xinjiang” oleh Sarada Subhash (2024). Jurnal ini menjelaskan tentang Pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung terhadap Uighur di Xinjiang sangat mengganggu dan melibatkan faktor-faktor geopolitik yang kompleks, termasuk narasi yang kontras, Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM), kepentingan geo-strategis Xinjiang, dan strategi kontra-terorisme Washington.

Nuril Khoiriyah (2023) melalui tulisannya yang berjudul “*The Violation of Human Security and Identity of Uighur Muslim Community Through Social Construction Process*” mengemukakan bahwa pelanggaran yang dilakukan terhadap Etnis Uighur di Xinjiang bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai sosialis dan komunis ke dalam identitas Uighur. Tulisan ini menggunakan teori konstruksi sosial yang mendasari argumen bahwa tujuan Pemerintah Cina adalah untuk mengendalikan provinsi mereka yang kaya akan sumber daya alam.

Dalam tulisannya yang berjudul “*Juridical Review of Cases of Human Rights Violations Against The Uighur Ethnic and Its Resolution Mechanisms in The Perspective of International Law*” Wita Setyaningrum (2023) membahas dua isu utama, yaitu bagaimana kasus pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang dalam perspektif hukum internasional dan bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang telah terjadi melalui perspektif hukum internasional.

Pada tulisan berjudul “*The Biopolitical Security State: Cina’s Pursuit of Stability in Xinjiang*”, Roberts (2020) membahas bagaimana Pemerintah Cina menerapkan kerangka biopolitik di Xinjiang dengan menekankan kontrol negara

atas kehidupan warganya sebagai cara untuk memastikan stabilitas sosial. Roberts berargumen bahwa pendekatan ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam praktik keamanan global, di mana negara-negara semakin memprioritaskan kontrol populasi untuk mengurangi ancaman yang dianggap membahayakan keamanan nasional. Artikel ini menyoroti dua tujuan utama dari kebijakan Pemerintah Cina yaitu menekan sentimen separatis di kalangan Uighur dan membentuk masyarakat harmonis yang sejalan dengan kerangka ideologis negara.

Dalam tulisan berjudul "*Cina's 'Asia Dream': The Belt and Road Initiative and the New Regional Order*" yang dirilis tahun 2016, Callahan menguraikan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan oleh Cina sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengaruhnya di Asia dan mempromosikan keterhubungan regional. Di sisi lain, Callahan juga mencatat tantangan dan resistensi yang dihadapi Cina dari negara-negara lain yang khawatir akan meningkatnya dominasi Cina di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memberikan konteks yang berharga untuk memahami kebijakan Cina di Xinjiang, tetapi masih ada celah dalam hal penerapan teori realisme ofensif. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyentuh aspek keamanan domestik atau teknologi, tanpa menggali lebih dalam strategi kekuasaan ofensif dalam konteks kebijakan Cina di Xinjiang. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menghubungkan tindakan Pemerintah Cina terhadap Uighur sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi, baik secara domestik maupun internasional. Dengan fokus pada bagaimana kebijakan di Xinjiang mencerminkan

prinsip-prinsip realisme ofensif, penelitian Anda akan memberikan perspektif baru dalam literatur yang ada, serta memperdalam pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan keamanan di Asia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan menambah perspektif baru yang melihat tindakan Cina sebagai langkah aktif untuk memaksimalkan kekuatan domestik dan menjaga hegemoninya di Asia Tengah melalui kebijakan domestik yang kuat dan represif.

Realisme merupakan salah satu teori dominan dalam studi hubungan internasional yang berfokus pada sifat dasar politik global yang bersifat kompetitif dan konflik. Teori ini berakar pada pemikiran klasik yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes, yang menekankan bahwa kekuasaan dan kepentingan nasional adalah pendorong utama perilaku negara. Dalam pandangan realis, sistem internasional diatur oleh anarki, di mana tidak ada otoritas pusat yang mampu mengatur interaksi antarnegara. Hal ini menyebabkan negara bertindak secara rasional dan egois, dengan tujuan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan keamanan mereka sendiri (Waltz, 1979).

Realisme membedakan dirinya dari pendekatan lain dalam hubungan internasional dengan menekankan bahwa negara adalah aktor utama dalam politik global. Dalam konteks ini, negara dipandang sebagai entitas tunggal yang rasional yang berusaha untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Ketika menghadapi ancaman atau tantangan, negara akan berusaha mengumpulkan sumber daya dan membangun kekuatan militer untuk memastikan keamanan dan stabilitasnya (Mearsheimer, 1995). Dalam pandangan realis, hubungan

antarnegara sering kali bersifat antagonistik, di mana ketidakpercayaan dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya terbatas menjadi hal yang umum.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, realisme klasik sebagai salah satu teori tertua dalam studi hubungan internasional memiliki beberapa cabang aliran yang lebih dinamis sehingga lebih relevan untuk situasi dunia saat ini. Salah satunya adalah realisme ofensif yang dikemukakan oleh John Mearsheimer. Kerangka teori realisme ofensif oleh Mearsheimer berfokus pada pemahaman bahwa negara-negara besar selalu berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan mereka untuk memastikan kelangsungan hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Beliau mengemukakan bahwa aliran realisme offensive berporos pada perilaku negara yang akan mengutamakan kedudukannya baik secara internal maupun eksternal bagaimanapun keadaannya (Mearsheimer, 2001).

Berbeda dengan pendekatan realisme defensif yang lebih menekankan pada stabilitas dan pencegahan konflik, realisme ofensif justru berpendapat bahwa negara-negara besar secara proaktif mencari kekuatan maksimal dan dominasi untuk melindungi diri dari ancaman. Dalam bukunya “The Tragedy of Great Power Politics”, Mearsheimer (2001) menjelaskan bahwa anarki dalam sistem internasional menciptakan ketidakpastian terhadap niat negara lain. Hal ini mendorong negara-negara besar untuk mengadopsi kebijakan agresif guna meminimalkan potensi ancaman.

Pada dasarnya, terdapat lima asumsi yang mendasari realisme ofensif. Pertama, sistem internasional bersifat anarkis, yang berarti tidak ada otoritas

tertinggi yang mengatur hubungan antar-negara. Kedua, negara adalah aktor utama yang bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu bertahan hidup. Ketiga, negara memiliki kapabilitas militer yang berbeda, dan perbedaan ini membuat setiap negara menjadi ancaman potensial bagi negara lain. Keempat, negara tidak pernah bisa mengetahui niat negara lain dengan pasti, menciptakan kecemasan bahwa negara lain mungkin mengancam mereka di masa depan. Kelima, tujuan utama dari setiap negara adalah bertahan hidup, yang memaksa mereka untuk mempertahankan diri, sering kali dengan cara ofensif (Mearsheimer, 2001).

Negara-negara besar yang berusaha meningkatkan kekuatan mereka untuk merasa aman sebenarnya membuat negara lain merasa terancam. Untuk mengatasi rasa ancaman ini, negara-negara tetangga pun meningkatkan kekuatan mereka, sehingga menciptakan siklus persaingan kekuatan yang dapat berujung pada konflik. Dengan kata lain, peningkatan keamanan oleh satu negara sering kali mengakibatkan ketidakamanan bagi negara lain, memicu balapan kekuatan di antara mereka. Menurut Mearsheimer, dalam dunia tanpa otoritas internasional yang efektif, negara hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk keamanan. Maka dari itu, mereka akan cenderung bersikap agresif, terutama ketika kesempatan untuk memperbesar kekuatan muncul (Mearsheimer, 2001).

Selain itu, Mearsheimer juga menekankan bahwa negara-negara besar tidak puas hanya dengan mencapai keamanan yang moderat, tetapi mereka selalu terdorong untuk mencapai dominasi atau hegemoni di kawasan mereka. Hal ini dilakukan karena posisi dominan mengurangi kemungkinan ancaman eksternal

yang signifikan. Namun, hegemoni global, menurut Mearsheimer, sangat sulit dicapai karena kendala geografis dan biaya besar yang terlibat. Negara-negara besar lebih realistis dalam berfokus pada pencapaian hegemoni regional, yang memungkinkan mereka memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah mereka sendiri dan meminimalkan ancaman dari saingan regional lainnya (Mearsheimer, 2001).

Selain mencapai hegemoni regional, Mearsheimer juga mencatat bahwa negara-negara besar akan berusaha untuk menghalangi munculnya hegemon regional di kawasan lain. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan besar lain yang dapat menyaingi pengaruhnya secara global. Dalam hal ini, Mearsheimer melihat kompetisi kekuatan antara negara-negara besar sebagai hal yang tidak terelakkan dan menganggap bahwa perdamaian jangka panjang hanya dapat dicapai jika satu negara berhasil mendominasi wilayahnya, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya persaingan yang serius.

Dalam konteks kebijakan Cina di Xinjiang, realisme ofensif dapat memberikan penjelasan tentang pendekatan agresif Cina dalam mengendalikan wilayah ini. Cina menganggap Xinjiang sebagai bagian strategis dari wilayahnya yang penting untuk menjaga stabilitas internal dan mencegah pengaruh eksternal yang dapat membahayakan posisi kekuatannya di Asia. Menurut Mearsheimer, negara-negara besar akan selalu berusaha untuk meningkatkan kekuasaan mereka guna memastikan keamanan mereka di lingkungan internasional yang anarkis, di mana mereka tidak dapat bergantung pada pihak eksternal untuk melindungi diri mereka dari ancaman potensial. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya Cina

untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman internal yang dapat mengganggu stabilitas negara, terutama mengingat posisi Xinjiang yang merupakan lokasi strategis di jalur menuju Asia Tengah merupakan pusat infrastruktur penting seperti dalam proyek *Belt and Road Initiative* (BRI).

Upaya untuk mengendalikan Xinjiang melalui kebijakan ketat dan represif menunjukkan strategi keamanan ofensif di mana Cina mencoba mengeliminasi potensi ancaman yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menimbulkan instabilitas. Dalam pandangan realisme ofensif, langkah Cina ini sejalan dengan logika keamanan yang menekankan perlunya negara besar untuk secara proaktif mengamankan wilayah strategis agar dapat mempertahankan dominasi regional mereka. Dengan mengamankan kontrol atas Xinjiang, Cina dapat mengeliminasi potensi ancaman internal, seperti gerakan separatisme Uighur, yang dianggap dapat melemahkan stabilitas nasional dan mengancam proyek-proyek strategisnya di luar negeri.

Pendekatan Cina yang ketat terhadap Xinjiang, termasuk kebijakan keamanan yang dianggap melanggar hak asasi manusia, mencerminkan strategi keamanan ofensif di mana negara mengelola ancaman potensial dengan cara yang proaktif dan agresif untuk melindungi kepentingannya. Mearsheimer berargumen bahwa tindakan seperti ini sesuai dengan pola perilaku negara besar dalam mencapai dominasi atas wilayah yang dianggap sebagai kepentingan vital (Mearsheimer, 2001). Penekanan pada kekuatan represif terhadap potensi gangguan internal juga dapat dianggap sebagai upaya Cina untuk mencegah adanya pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitasnya di wilayah

ini, seperti keterlibatan dari kelompok asing atau negara yang berpotensi mendukung hak asasi manusia di Xinjiang (Clarke, 2010; Mearsheimer, 2001).

Secara keseluruhan, kerangka teori realisme ofensif Mearsheimer memberikan perspektif yang kuat tentang bagaimana negara-negara besar berperilaku dalam sistem internasional yang anarkis. Negara-negara besar akan terus meningkatkan kekuatan mereka, mencari peluang untuk mendominasi kawasan mereka, dan menghindari munculnya kekuatan saingan. Bagi Mearsheimer, pendekatan agresif ini bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mencapai keamanan dan kelangsungan hidup. Dalam sistem tanpa otoritas pusat yang mampu menjamin keamanan, negara-negara besar akan selalu termotivasi untuk mengadopsi kebijakan ofensif sebagai bentuk perlindungan diri mereka. Pandangan ini memberikan wawasan tentang pola perilaku negara-negara besar yang tidak terhindarkan dan sering kali mengarah pada ketegangan serta persaingan antar negara.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Kebijakan Represif

Kebijakan represif merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh negara atau institusi yang bertujuan untuk membatasi, mengendalikan, atau menekan kebebasan individu atau kelompok tertentu guna menjaga stabilitas politik, keamanan, atau kepentingan dominan pihak yang berkuasa. Menurut Gurr dalam bukunya *Why Men Rebel* (1970), kebijakan represif sering kali berwujud dalam bentuk pembatasan kebebasan berpendapat, pengawasan ketat, penahanan

sewenang-wenang, hingga penggunaan kekerasan sistematis untuk mencegah oposisi atau potensi ancaman terhadap rezim yang berkuasa. Kebijakan ini biasanya muncul dalam konteks pemerintahan otoriter, meskipun juga dapat ditemukan dalam rezim demokratis ketika terjadi keadaan darurat atau ancaman yang dianggap signifikan.

Dalam hal ini, represivitas sering kali didasarkan pada argumen keamanan nasional, namun pada praktiknya dapat melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berujung pada marginalisasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, kebijakan represif menjadi objek kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, seperti yang diuraikan oleh David Beetham dalam *The Legitimation of Power* (1991).

1.6.1.2 Kerusuhan, Ekstremisme, Separatisme dan Terorisme

Kerusuhan dalam konteks Hubungan Internasional sering kali merujuk pada bentuk perlawanan massal yang terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau politik. Menurut Edward Azar dalam bukunya *"The Management of Protracted Social Conflict"* (1990), kerusuhan adalah reaksi terhadap ketidakadilan yang sering kali melibatkan kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan atau terdiskriminasi. Azar mengembangkan teori tentang konflik sosial yang berlarut-larut (*protracted social conflict*), yang menyatakan bahwa kerusuhan sering kali terjadi ketika ada ketegangan etnis, agama, atau identitas yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik atau politik yang ada. Dalam konteks ini, kerusuhan bukan hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi

juga mencerminkan ketegangan yang mendalam dan bertahan lama dalam hubungan sosial dan politik.

Ekstremisme sering kali dikaitkan dengan pandangan ideologis yang radikal dan bertentangan dengan norma-norma yang diterima oleh mayoritas masyarakat. Ekstremisme diartikan sebagai pandangan yang sangat radikal, baik dalam konteks politik, agama, atau ideologi, yang menolak kompromi dan cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Ekstremisme dapat berkembang dalam berbagai bentuk, baik itu ekstremisme agama yang menuntut penerapan hukum agama secara ketat, atau ekstremisme politik yang menginginkan perubahan mendalam dalam struktur kekuasaan yang ada. Dalam perspektif hubungan internasional, ekstremisme sering kali dipandang sebagai salah satu pendorong terjadinya terorisme atau pemberontakan (Baylis et al., 2020).

Separatisme adalah gerakan yang berusaha untuk memisahkan diri dari negara atau wilayah yang lebih besar untuk membentuk negara atau entitas politik yang independen. Dalam perspektif politik internasional, separatisme sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap integritas teritorial negara. Drezner (2015) menjelaskan bahwa separatisme biasanya muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial atau ketidaksetaraan politik yang dialami oleh kelompok tertentu. Separatisme tidak hanya mencakup tuntutan untuk kebebasan politik, tetapi juga untuk pelestarian identitas etnis, budaya, atau agama yang dianggap terancam oleh dominasi negara pusat. Dalam banyak kasus, separatisme bisa berkembang menjadi konflik bersenjata jika negara yang lebih besar menanggapi tuntutan tersebut dengan cara yang represif.

Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologis. Menurut Bruce Hoffman dalam bukunya "*Inside Terrorism*" (2006), terorisme merujuk pada upaya kelompok atau individu untuk menciptakan ketakutan melalui serangan yang sengaja menargetkan warga sipil, untuk memaksa pemerintah atau masyarakat agar mematuhi tuntutan mereka. Terorisme tidak hanya mengandalkan tindakan kekerasan fisik, tetapi juga strategi untuk menciptakan ketakutan dan ketidakamanan di kalangan masyarakat. Terorisme bisa dilakukan oleh kelompok dengan ideologi radikal, baik itu agama, politik, atau nasionalis, dan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk serangan, mulai dari bom bunuh diri hingga serangan bersenjata yang menargetkan tempat-tempat publik.

1.6.1.3 *National Interest*

Dalam perspektif realisme ofensif yang dikembangkan oleh John Mearsheimer, konsep *national interest* atau kepentingan nasional berfokus terutama pada pencapaian dan pemeliharaan kekuatan maksimum sebagai jalan untuk mencapai keamanan negara. Menurut Mearsheimer, negara-negara besar selalu termotivasi untuk meningkatkan kekuasaan mereka secara proaktif dalam lingkungan internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas pusat yang dapat menjamin keamanan. Oleh karena itu, kepentingan nasional negara besar tidak hanya terbatas pada mempertahankan status quo, tetapi juga mencakup upaya untuk memperluas kekuatan guna mencegah ancaman eksternal dan internal yang dapat menggoyahkan stabilitas atau posisi kekuasaan mereka.

Kepentingan nasional mendorong negara untuk mencapai dominasi regional dan untuk menanggulangi ancaman potensial sebelum mereka menjadi masalah nyata. Dalam konteks ini, kepentingan nasional tidak hanya mencakup perlindungan teritorial, tetapi juga upaya proaktif untuk melemahkan saingan potensial dan mencegah munculnya kekuatan saingan di kawasan yang sama (Mearsheimer, 2001).

1.6.1.4 *Power Maximization*

Power maximization dalam perspektif realisme ofensif menekankan bahwa negara-negara besar tidak hanya berupaya mempertahankan diri, tetapi juga berusaha secara aktif untuk memperbesar kekuatan mereka guna mengurangi risiko ancaman dari negara lain. Dalam lingkungan internasional yang anarkis, setiap negara tidak pernah sepenuhnya mengetahui niat negara lain, sehingga mereka terdorong untuk mencapai posisi kekuatan tertinggi agar dapat mengontrol atau mengimbangi ancaman potensial. Negara-negara besar termotivasi untuk memaksimalkan kekuatan mereka baik dalam hal kapabilitas militer maupun ekonomi, dengan tujuan mengamankan status hegemoni regional. Pendekatan ini berakar pada prinsip bahwa keamanan jangka panjang hanya dapat dicapai ketika suatu negara berada pada posisi yang unggul secara strategis terhadap lawan-lawannya (Mearsheimer, 2001).

John Mearsheimer mengidentifikasi sejumlah indikator yang mencerminkan upaya negara untuk memaksimalkan kekuasaannya (*power maximization*) dalam sistem internasional. Salah satu indikator utama adalah peningkatan kekuatan militer, yang mencakup modernisasi persenjataan, ekspansi

angkatan bersenjata, dan pengembangan strategi yang memungkinkan proyeksi kekuatan di luar wilayah domestik. Selain itu, negara juga terlihat aktif dalam memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka, baik melalui diplomasi, investasi strategis, maupun penguasaan sumber daya penting yang dapat meningkatkan daya tawar mereka terhadap negara lain. Indikator lainnya adalah keterlibatan dalam aliansi yang dirancang untuk melemahkan atau mengisolasi pesaing, serta mencegah negara lain mencapai paritas kekuatan. Negara juga sering menggunakan ancaman militer untuk mengamankan posisi strategis. Semua ini dilakukan dalam kerangka realisme ofensif, yang berargumen bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, memaksimalkan kekuatan adalah cara terbaik bagi negara untuk melindungi kepentingannya dan memastikan kelangsungan hidupnya di tengah ketidakpastian niat negara lain (Mearsheimer, 2001).

1.6.1.5 *Offensive Security*

Kerangka konseptual *offensive security* dalam konteks hubungan internasional berfokus pada pendekatan proaktif yang diambil oleh negara untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasionalnya melalui penggunaan kekuatan, aliansi, dan kebijakan yang agresif. Dalam realisme ofensif, *offensive security* diartikan sebagai upaya negara untuk tidak hanya mempertahankan diri, tetapi juga untuk mengambil inisiatif dalam memperkuat posisi strategis mereka terhadap pesaing. Pendekatan ini mencakup pengembangan kapabilitas militer, ekspansi pengaruh politik, serta pencarian aliansi strategis yang dapat memperkuat posisi negara di panggung global. Dalam pandangan realis, ketidakpastian mengenai niat negara lain mendorong negara untuk mengambil tindakan ofensif yang diperlukan

untuk mempertahankan dan memperluas kekuatan mereka. Secara lebih luas, *offensive security* mencerminkan strategi di mana negara tidak hanya berfokus pada pertahanan pasif, tetapi juga aktif berupaya untuk mempengaruhi dan mendominasi lingkungan keamanan di sekitarnya (Snyder, 2002).

Offensive security lebih spesifik pada tindakan-tindakan ofensif yang diambil untuk mengatasi ancaman keamanan langsung. Pendekatan ini melibatkan strategi agresif, termasuk penggunaan kekuatan militer atau langkah diplomatik yang bertujuan untuk mencegah ancaman potensial dari negara lain sebelum menjadi lebih besar. Fokus utamanya adalah menciptakan kondisi keamanan melalui dominasi, dengan menekan atau menghilangkan ancaman secara langsung.

1.6.1.6 Regional Hegemony

Regional hegemony mengacu pada dominasi suatu negara atas negara-negara lain di 23elativ tertentu, yang memungkinkan negara hegemon untuk menetapkan aturan, norma, dan kebijakan yang mengatur interaksi internasional dalam wilayah tersebut. Dalam konteks teori realisme, terutama yang dipaparkan oleh John Mearsheimer, negara-negara besar cenderung mengejar status hegemon di kawasan mereka untuk memastikan keamanan dan kepentingan nasional. Mearsheimer berargumen bahwa pencapaian hegemoni regional adalah langkah krusial bagi negara untuk meminimalkan ancaman dari negara-negara lain dan mengontrol dinamika kekuasaan di sekitarnya (Mearsheimer, 2001). Konsep ini juga mencakup elemen pengaruh, di mana negara hegemon mampu memproyeksikan kekuatan melalui kebijakan luar negeri yang aktif, seperti aliansi militer, pengaruh ekonomi, dan keterlibatan diplomatik yang strategis. Negara

hegemon tidak hanya berupaya untuk memperkuat posisi dirinya sendiri, tetapi juga berusaha untuk mencegah kebangkitan kekuatan rival yang dapat menantang dominasi mereka (Ikenberry, 2001). Dalam konteks ini, stabilitas kawasan sering kali bergantung pada keberadaan negara hegemon yang dapat menegakkan tatanan internasional yang menguntungkan mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang relatif aman bagi negara-negara kecil di sekitarnya.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Kebijakan Represif

Dalam penelitian ini, kebijakan represif adalah serangkaian Tindakan yang diterapkan oleh Pemerintah Cina terhadap Etnis Uighur di Xinjiang. Kebijakan ini mencakup penahanan massal dalam fasilitas yang disebut "pusat pendidikan ulang", pengawasan massal berbasis teknologi dan pelarangan praktik keagamaan tertentu, Kebijakan ini didasarkan pada narasi resmi pemerintah yang menyebutnya sebagai langkah melawan ekstremisme dan separatism. Dengan demikian, kebijakan represif di Xinjiang beroperasi melalui mekanisme kontrol sosial dan politik yang komprehensif, yang bertujuan untuk membatasi otonomi kelompok etnis tertentu secara sistematis.

1.6.2.2 Kerusuhan, Ekstremisme, Separatisme dan Terorisme

Konsep kerusuhan, ekstremisme, separatisme dan terorisme dalam penelitian dapat dilihat dalam ketegangan etnis, agama, dan politik yang terjadi antara Pemerintah Cina dan etnis Uighur. Kerusuhan, seperti yang terjadi di Urumqi pada 2009, ekstremisme mengacu pada ideologi radikal yang menginspirasi kekerasan dan dipandang sebagai ancaman oleh Pemerintah Cina. Separatisme mengacu pada gerakan yang ingin memisahkan Xinjiang dari Cina untuk mendirikan negara merdeka. Terorisme juga menjadi bagian dari dinamika ini, dengan kelompok yang terkait dengan separatisme Uighur melakukan serangan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka, seperti yang terlihat dalam serangan di Stasiun Kereta Kunming pada 2014.

1.6.2.3. *National Interest*

Konsep *national interest* menurut teori realisme ofensif akan dijadikan acuan dalam melihat bagaimana kepentingan nasional menjadi alasan utama suatu negara untuk mengambil kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menjabarkan bagaimana Pemerintah Cina memiliki kepentingan untuk memastikan wilayah Xinjiang aman dari ancaman terorisme dan separatisme oleh etnis Uighur. Selain itu Cina juga memastikan bahwa wilayah ini tetap dalam kontrol penuh pemerintah pusat sehingga tidak mengganggu kepentingan ekonomi mereka, terutama karena Xinjiang merupakan jalur sutra dalam menyalurkan BRI ke kawasan Asia Tengah dan sekitarnya.

1.6.2.3 Power Maximization

Dalam konteks *power maximization* yang menekankan bahwa negara-negara besar tidak hanya berupaya mempertahankan diri, tetapi juga berusaha secara aktif untuk memperbesar kekuatan mereka guna mengurangi risiko ancaman baik dari internal maupun eksternal. Hal ini berbanding lurus dengan perilaku Pemerintah Cina yang melakukan pergerakan secara masif melalui kebijakan represifnya. Bagaimana Cina mengerahkan kekuatan militernya untuk mengawasi daerah konflik tersebut dengan menugaskan aparat keamanan yang besar dan teknologi pengawasan canggih untuk memastikan kontrol penuh atas Xinjiang. Dari perilaku tersebut dapat dilihat bahwa Cina memaksimalkan kekuatan yang dimilikinya untuk tetap mengendalikan Xinjiang di bawah kekuasaan mutlaknya.

1.6.2.4 Offensive Security

Kebijakan Cina di Xinjiang juga mencerminkan pendekatan *offensive security*, yaitu strategi yang proaktif untuk menekan potensi ancaman melalui tindakan yang tegas. Tindakan seperti kamp pendidikan ulang dan pengawasan teknologi tinggi mencerminkan upaya pemerintah untuk tidak hanya mempertahankan stabilitas, tetapi juga untuk mencegah sekaligus "menyerang" perkembangan ekstremisme dan separatisme sebelum mereka berkembang menjadi ancaman nyata. Langkah-langkah ofensif ini ditujukan untuk menciptakan kontrol sosial yang ketat dan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tidak menjadi basis perlawanan terhadap pemerintah pusat.

1.6.2.5 Regional Hegemony

Dalam realisme ofensif dimana konsep *regional hegemony* digunakan untuk menjelaskan perilaku negara atas dominasinya terhadap negara-negara lain di kawasan tersebut, Cina memiliki ambisi untuk mencapai *regional hegemony* di Asia Tengah, dan stabilitas di Xinjiang memainkan peran penting dalam tujuan ini. Penulis akan menjabarkan bagaimana stabilitas daerah Xinjiang dapat berpengaruh signifikan terhadap dominasi dan pengaruh Cina di kawasan Asia Tengah, sebuah langkah strategis untuk mempertahankan pengaruh dan kontrolnya di kawasan yang lebih luas.

1.7 Argumen Penelitian

Kebijakan represif terhadap etnis Uighur dapat dilihat sebagai strategi *offensive security* yang bertujuan untuk menanggulangi ancaman sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dengan meningkatkan kehadiran militer dan pelaksanaan ekspansi ekonomi sebagai bentuk dari *power maximization*, Cina bertujuan untuk mengeliminasi potensi gerakan separatis dan ekstrimisme yang dapat mengganggu stabilitasnya. Melalui kontrol ketat atas wilayah strategis Xinjiang pula, Cina berusaha untuk melindungi jalur penting bagi ekonominya sehingga dapat memperkuat posisinya untuk mencapai *regional hegemony* di Asia Tengah. Dengan demikian, berdasarkan realisme ofensif, tindakan Cina dapat dilihat sebagai langkah untuk memaksimalkan kekuatan dan memastikan stabilitas domestik yang berkelanjutan sebagai prasyarat bagi ambisi hegemonik di kawasan.

1.8 Metode Penelitian

John Ward Cresswell mendefinisikan metode penelitian sebagai langkah-langkah sistematis yang diikuti oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk merencanakan, melaksanakan dan menganalisis penelitian. Hal ini mencakup desain penelitian yang dipilih, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, serta interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan. Beberapa metode penelitian yang umum digunakan termasuk penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran. Cresswell mengemukakan tiga pendekatan utama dalam metode penelitian yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran. Dengan mengacu pada dasar tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas suatu fenomena. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk menggali makna dan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti (Cresswell, 2014).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif adalah tipe penelitian yang menjelaskan suatu fenomena atau karakteristik populasi, atau mengukur peristiwa dalam populasi tertentu. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang sedang diteliti serta menjelaskan dengan kompleks sebab terjadinya suatu peristiwa dengan

melihat hubungan antar dua atau lebih variabel. Kemudian penulis akan menganalisis hubungan antar variabel tersebut menggunakan teori yang telah ditentukan.

1.8.2 Situs Penelitian

Xinjiang, Cina merupakan subjek utama penelitian ini, namun segala informasi mengenai kondisi dan kebijakan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diakses secara daring. Oleh karena itu, penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian yang berlandaskan pada *online database*. Informasi yang diperoleh dari metode *online database* dianggap sudah cukup untuk menunjang keseluruhan penelitian ini hingga selesai nanti.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini memiliki subjek utama, yaitu Pemerintah Cina. Subjek utama ini menduduki peran penting untuk keseluruhan penelitian yang tentunya juga akan membantu dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian dan proses analisis menggunakan mata pisau yang telah ditentukan.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merujuk pada informasi yang menangkap kualitas dan karakteristik yang dapat diamati dan tidak dapat diukur dengan angka. Data ini sering digunakan dalam penelitian sosial

untuk memahami fenomena, pengalaman, dan makna yang diberikan individu terhadap suatu situasi. Terdapat beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi, studi kasus, dan telaah dokumen. Masing-masing metode ini memberikan wawasan yang mendalam dan konteks yang lebih kaya tentang subjek yang diteliti. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, data kualitatif mampu menggali nuansa dan kompleksitas dalam perilaku manusia dan interaksi sosial, menjadikannya sangat berharga dalam bidang penelitian sosial dan humaniora.

1.8.5 Sumber Data

Demi menunjang keberhasilan penelitian ini, sumber data yang akan diambil adalah dari sumber data primer dan sekunder. Hal tersebut mengingat bahwa penulis membutuhkan kedua sumber data yang ada. Sumber data primer sendiri akan didapatkan dari sumber resmi, pernyataan langsung, arsip dan dokumen-dokumen resmi yang dinyatakan ataupun dikeluarkan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian untuk sumber data sekunder, penulis akan menggunakan sumber data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain (tangan kedua) seperti penelitian terdahulu, jurnal-jurnal publikasi, berita dan arsip dari pihak yang memiliki sumber kredibel.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah studi pustaka atau studi literatur. Teknik pengumpulan data ini

melibatkan kajian dan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur membantu peneliti untuk memahami teori, konsep dan metode yang relevan dengan penelitian mereka. Melalui literatur, peneliti dapat memperoleh perspektif yang luas, mendapatkan informasi terkini dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat menjadi dasar penelitian mereka. Maka dari itu, melalui studi literatur, penulis dapat menemukan landasan berpikir dalam menulis penelitian ini dengan mengkaji informasi yang ada.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis data kualitatif. Proses analisis dan interpretasi data berlangsung secara iteratif dan interaktif. Peneliti melibatkan refleksi mendalam pada data, membandingkan temuan dengan literatur yang ada, dan memeriksa keselarasan temuan dengan tujuan penelitian.

1.8.8 Kualitas Data (Goodness Criteria)

Data-data serta informasi yang akan diambil dan digunakan dalam penelitian ini merupakan dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Data-data tersebut diambil dari situs berlangganan yang diberikan sebagai fasilitas untuk mahasiswa Universitas Diponegoro pada fitur SIAP dan melalui pengamatan isu melalui media lokal dan internasional melalui internet. Jurnal yang digunakan antara lain, Jstor, Scopus dan lain sebagainya.